

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Munculnya politik pasifikasi di Aceh pada dasarnya atas gagasan yang dianjurkan oleh C. Snouck Hurgronje dan dilaksanakan pada era Swart di tahun 1908 Suatu politik yang menunjukkan sikap damai yang ditunjukkan melalui berbagai usaha dalam bidang politik, ekonomi dan kebudayaan. Dengan politik ini, Belanda mulai memperlihatkan sikap lunak kepada masyarakat Aceh, sehingga muncul berbagai usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda dalam mewujudkan Pasifikasi Aceh bisa dikatakan cukup berhasil. Di Aceh Timur keadaan perekonomian dan politik pasca perang semakin meningkat, di samping rakyat kian percaya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam Pasifikasi diutamakan menyentuh segmen pendidikan rakyat Bumiputra yang telah digagas dalam Politik Etis.
2. Ada beberapa faktor akibat dari politik pasifikasi di Aceh Timur yaitu:
 - a. Politik, politik kolonial yang sangat kental dengan prinsip liberalisme yang dianggap sudah usang dan beralih ke prinsip-prinsip Etis. Artinya wilayah Aceh Timur merupakan satu-satunya wilayah yang paling kondusif di seluruh Aceh, walaupun bukan berarti tanpa pertumpahan darah sama sekali dengan menaklukkan negeri-negeri di sana dan membangun dan menata wilayah Aceh Timur setelah perang berakhir.

- b. Ekonomi, masyarakat Aceh Timur telah banyak mengalami perubahan, walaupun sebenarnya diakui bahwa pembangunan Aceh lebih ditekankan pada kepentingan politik di atas kepentingan ekonomi Kolonial Belanda. Akibat dari politik pasifikasi di Aceh Timur, pertama meningkatnya perekonomian rakyat Perkembangan Sosial Ekonomi di Daerah Aceh Timur, pembangunan prasarana fisik, pembangunan perekonomian dan pembangunan di bidang pendidikan. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda dalam mewujudkan Pasifikasi di Aceh Timur bisa dikatakan cukup berhasil. Keadaan perekonomian dan politik pasca perang semakin meningkat, di samping rakyat kian percaya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Masyarakat Aceh telah banyak mengalami perubahan, walaupun sebenarnya diakui bahwa pembangunan Aceh lebih ditekankan pada kepentingan politik di atas kepentingan ekonomi.
- c. Sosial, Pada masa Kolonial Belanda hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat Aceh yang menempatkan pihak-pihak tertentu (individu, keluarga, kelompok, kelas) didalam posisi-posisi sosial tertentu berdasarkan suatu sistem nilai dan norma yang berlaku pada suatu masyarakat pada waktu itu. Meskipun pasifikasi dianggap berhasil memberi sesuatu yang berarti bagi masyarakat pribumi, fakta sejarah justru membuktikan bahwa Belanda tidak pernah

mengalami masa damai yang sesungguhnya di Aceh hingga kekuasaan mereka berakhir tahun 1942.

- d. Pendidikan, Politik etnis telah memberi pengaruh yang sangat luas bagi pendidikan masyarakat Indonesia termasuk bagi pendidikan rakyat di Aceh. Pelaksanaan pendidikan bersifat diskriminatif karena terdapat dua macam sekolah, “Sekolah Kelas I dan Sekolah Kelas II. Sekolah jenis pertama diperuntukkan bagi anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berkedudukan atau berharta sedangkan sekolah jenis kedua diperuntukkan bagi anak-anak pribumi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Penulis Berharap bahwa munculnya politik pasifikasi di Aceh Timur sebagai sebuah kelemahan bangsa Indonesia di masa lalu sehingga terjajah oleh bangsa asing, maka dengan ini bangsa Indonesia haruslah menjadi bangsa yang kuat tidak terjajah lagi dimasa yang akan datang. Di samping itu, penulis menyarankan kepada masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa penjajahan adalah suatu bentuk tindakan yang tidak dibenarkan dalam tatanan bernegara.
2. Penulis juga berharap tidak ada lagi kolonialisasi di Indonesia dalam bentuk apapun dan keadaan apapun, semoga Indonesia menjadi negara yang kuat ekonomi dan lebih baik lagi menjadi negara maju di dunia.